



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SUTAJI
NIK : 5308200908680001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 3 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTAJI
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 83448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/55 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 196.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.636.200

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.586.136.200

III. HUTANG Rp. 135.315.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.450.820.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

 Bukti Penerimaan SPT Tahunan ...

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan:
(021) 1500200
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor BPE : **BPE-
33088/CT/KPP.1203/2026**

Tanggal : 19 Februari 2026

NPWP : 5308200908680001

Nama Wajib
Pajak : SUTAJI

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak : 2025

Masa Pajak : Januari - Desember 2025

Status SPT : Normal

Saluran : Portal Wajib Pajak

Tanggal
Terima SPT : 19 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Direktorat Jenderal Pajak dan sah sebagai Bukti Penerimaan

**Direktorat Jenderal ...****Kunjungi situs** 

Hapus



Balas



Teruskan



Pindahkan



Lainnya

